



**GUNUNGMASKAB.GO.ID**  
SITUS RESMI PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS

Pencarian ...



**JAYA S. MONONG, S.E., M.Si** **Ir. EFRENSIA L.P. UMBING, M.Si**  
Bupati Gunung Mas Wakil Bupati Gunung Mas

# Selamat Datang

Di Website Resmi **Pemerintah Kabupaten Gunung Mas**

 [gunungmaskab.go.id](https://gunungmaskab.go.id)

 [Kominfo Gumas](#)

 [youtube.com/Kominfo Santik Gunung Mas](https://youtube.com/Kominfo Santik Gunung Mas)

 [@diskominfosantikgumas](#)

[Beranda](#) [Profil Daerah](#) [Pemerintahan](#) [Potensi Daerah](#) [PPID](#) [Media](#) [IPKD](#) [Kontak](#)



TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH  
TAHUN 2025

Tahun 2025

Tahun 2024

Tahun 2023

Tahun 2022

Tahun 2021

Tahun 2020

 [Lapor Pak Bupati !](#)



# RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2025-2026

---

Badan Perencanaan Pembangunan dan  
Penelitian Pengembangan Daerah  
Kabupaten Gunung Mas  
Tahun 2024



**BUPATI GUNUNG MAS  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KABUPATEN GUNUNG MAS  
NOMOR 1 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN GUNUNG MAS  
TAHUN 2025-2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GUNUNG MAS,**

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Diktum Kesatu huruf b dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir Pada Tahun 2024 yang menyebutkan bahwa Bupati/Walikota yang daerahnya memiliki periode RPJMD berakhir tahun 2024, untuk menyusun Dokumen Perencanaan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025-2026 serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk Menyusun Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2026 dan sesuai Diktum Ketiga huruf b bahwa Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025-2026 dan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025-2026 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Gunung Mas tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

KABAG	KASUBBAG / PJ FUNGSIONAL SETA
1	8

### **Pasal 8**

Perubahan RPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 9**

- (1) Dalam hal pelaksanaan RPD Tahun 2025-2026 target sasaran kinerja yang ditetapkan telah tercapai, maka dirumuskan kembali besaran target sasaran kinerja baru.
- (2) Dalam hal pelaksanaan RPD Tahun 2025-2026 target sasaran kinerja yang ditetapkan sulit tercapai, maka dirumuskan Kembali penyesuaian besaran target sasaran kinerja baru.
- (3) Target besaran kinerja baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

## **BAB VI KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 10**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun  
pada tanggal 5 Februari 2024

BUPATI GUNUNG MAS,



JAYA SAMAYA MONONG

Diundangkan di Kuala Kurun  
pada tanggal 5 Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GUNUNG MAS,

RICHARD

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2024 NOMOR 696

Indikasi Rencana Program Perangkat Daerah yang disertai Kebutuhan Pendanaan  
Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 - 2026

2024-01-29

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2025		2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			796.396.934.668		802.691.224.289		1.599.088.158.957		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			384.398.085.447		392.842.012.515		777.240.097.962		
	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA			384.398.085.447		392.842.012.515		777.240.097.962		
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan (Dengan Satuan:%)	100	100	297.900.081.747	100	302.000.000.000	100	599.900.081.747	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olah Raga
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	terlaksanannya pembangunan pada jenjang pendidikan PAUD, SD, SMP (Dengan Satuan:%)	100	100	85.248.003.700	100	89.442.012.515	100	174.690.016.215	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olah Raga
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (Dengan Satuan:%)	100	100	400.000.000	100	450.000.000	100	850.000.000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olah Raga
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	tercapainya standar pendidik dan tenaga kependidikan (Dengan Satuan:%)	100	100	500.000.000	100	500.000.000	100	1.000.000.000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olah Raga
1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar (Dengan Satuan:%)	100	100	200.000.000	100	300.000.000	100	500.000.000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olah Raga
1.01.06	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) (Dengan Satuan:%)	100	100	150.000.000	100	150.000.000	100	300.000.000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olah Raga
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			218.557.842.820		209.619.798.404		428.177.641.224		
	DINAS KESEHATAN			218.557.842.820		209.619.798.404		428.177.641.224		
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas (Dengan Satuan:%)	72,27	76,22	127.633.319.529	77,16	120.901.205.185	80	248.534.524.714	Dinas Kesehatan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2025		2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase ketersediaan sarana, prasarana, alat kesehatan (S,P,A) sesuai standar (Dengan Satuan:%)	44,54	50,54	79.833.010.691	60	77.175.095.249	75	157.008.105.940	Dinas Kesehatan
		Persentase cakupan Standar Pelayanan Minimal (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		Dinas Kesehatan
		Angka Stunting Kabupaten Gunung Mas (Dengan Satuan:%)	38,21	33,37		29		19		Dinas Kesehatan
		Persentase capaian rata-rata pengendalian dan pencegahan penyakit menular dan tidak menular (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		Dinas Kesehatan
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase cakupan ketersediaan dan kualitas SDM Kesehatan sesuai standar (Dengan Satuan:%)	64,42	64,42	9.952.262.870	70	10.339.839.170	90	20.292.102.040	Dinas Kesehatan
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase pengawasan perizinan sarana pelayanan kefarmasian (apotek dan toko obat) dan UMOT serta pengawasan pre dan post market pangan sesuai standa (Dengan Satuan:%)	64,42	100	293.447.660	100	304.117.560	100	597.565.220	Dinas Kesehatan
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah kebijakan publik berwawasan kesehatan yang dihasilkan (Dengan Satuan:Kebijakan)	1	3	845.802.070	4	899.541.240	4	1.745.343.310	Dinas Kesehatan
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUMDAN PENATAAN RUANG			149.362.183.626		155.430.480.225		304.792.663.851		
	DINAS PEKERJAAN UMUM			149.362.183.626		155.430.480.225		304.792.663.851		
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	terlaksananya pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah (Dengan Satuan:%)	90	100	13.542.183.626	100	13.210.480.225	100	26.752.663.851	Dinas Pekerjaan Umum
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (Dengan Satuan:Ha)	90	100	8.420.000.000	100	8.420.000.000	100	16.840.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	pengembangan sistem penyediaan air minum (Dengan Satuan:%)	90	100	7.400.000.000	100	7.500.000.000	100	14.900.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	pengembangan sistem air limbah (Dengan Satuan:%)	90	100	2.600.000.000	100	2.700.000.000	100	5.300.000.000	Dinas Pekerjaan Umum

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2025		2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	tersusunnya NSPK (Dengan Satuan:%)	90	90	500.000.000	90	600.000.000	90	1.100.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	penataan bangunan gedung (Dengan Satuan:%)	90	100	18.000.000.000	100	20.000.000.000	100	38.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	penataan bangunan dan lingkungannya (Dengan Satuan:%)	90	100	1.700.000.000	100	1.800.000.000	100	3.500.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	penyelenggaraan jalan (Dengan Satuan:%)	90	100	96.000.000.000	100	100.000.000.000	100	196.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	pengembangan jasa konstruksi (Dengan Satuan:%)	90	100	600.000.000	100	600.000.000	100	1.200.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	penyelenggaraan panataan ruang (Dengan Satuan:%)	90	100	600.000.000	100	600.000.000	100	1.200.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			19.450.000.000		19.950.000.000		39.400.000.000		
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Rasio rumah layak huni (Dengan Satuan:%)	90	100	150.000.000	100	200.000.000	100	350.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase pemukiman yang tertata (Dengan Satuan:%)	90	100	1.700.000.000	100	1.750.000.000	100	3.450.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU (Dengan Satuan:%)	90	100	17.600.000.000	100	18.000.000.000	100	35.600.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			18.718.822.775		18.938.933.145		37.657.755.920		
	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA			11.809.251.803		11.567.247.120		23.376.498.923		
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran(%); Persentase Realisasi Pengadaan Pakaian Dinas(%); Persentase Aparatur Terampil(%); Persentase P (Dengan Satuan:Persen)	100	100	4.739.203.260	100	4.739.203.260	100	9.478.406.520	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pengendalian Kebisingan dari Kegiatan Masyarakat;Persentase Pendataan Anggota Linmas pada Seluruh Kecamatan/Desa Se Kab. Gunung Mas (Dengan Satuan:Persen)	100	100	3.710.902.893	100	3.599.337.930	100	7.310.240.823	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Capaian Kebutuhan Penanggulangan Bencana (Dengan Satuan:Persen)	100	100	104.278.959	100	100.229.680	100	204.508.639	Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2025		2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Capaian Pencegahan Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran (Dengan Satuan:Persen)	100	100	3.254.866.691	100	3.128.476.250	100	6.383.342.941	Satuan Polisi Pamong Praja
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			6.909.570.972		7.371.686.025		14.281.256.997		
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	terlaksananya pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah (Dengan Satuan:%)	100	100	3.739.570.972	100	3.971.686.025	100	7.711.256.997	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Cakupan pelayanan bencana daerah (Dengan Satuan:%)	100	100	1.820.000.000	100	1.900.000.000	100	3.720.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) (Dengan Satuan:%)	100	100	1.350.000.000	100	1.500.000.000	100	2.850.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			5.910.000.000		5.910.000.000		11.820.000.000		
	DINAS SOSIAL			5.910.000.000		5.910.000.000		11.820.000.000		
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	terlaksananya pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah (Dengan Satuan:%)	90	100	3.500.000.000	100	3.500.000.000	100	7.000.000.000	Dinas Sosial
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial (Dengan Satuan:%)	50	60	600.000.000	60	600.000.000	60	1.200.000.000	Dinas Sosial
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang tertangani (Dengan Satuan:%)	50	60	400.000.000	60	400.000.000	60	800.000.000	Dinas Sosial
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM) (Dengan Satuan:%)	100	100	1.260.000.000	100	1.260.000.000	100	2.520.000.000	Dinas Sosial
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota (Dengan Satuan:%)	100	100	150.000.000	100	150.000.000	100	300.000.000	Dinas Sosial
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			85.969.971.172		85.281.556.744		171.251.527.916		
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			592.802.320		633.374.010		1.226.176.330		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2025		2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH			592.802.320		633.374.010		1.226.176.330		
2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja (Dengan Satuan:%)	90	100	100.000.000	100	100.000.000	100	200.000.000	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, Dan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Meningkatkan pengetahuan dan pelatihan bagi pencari kerja (Dengan Satuan:%)	100	100	169.083.758	100	162.518.030	100	331.601.788	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, Dan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Terdatanya tenaga kerja asing yang memiliki VITAS dan ITAS (Dengan Satuan:%)	100	100	150.000.000	100	200.000.000	100	350.000.000	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, Dan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Pelaksanaan data dan sarana hubungan industrial (Dengan Satuan:%)	100	100	173.718.562	100	170.855.980	100	344.574.542	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, Dan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			2.889.000.000		3.024.000.000		5.913.000.000		
	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			2.889.000.000		3.024.000.000		5.913.000.000		
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG pada belanja langsung APBD (Dengan Satuan:%)	5	5	800.000.000	5	850.000.000	5	1.650.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		Indeks Pembangunan Gender (IPG) (Dengan Satuan:%)	92.09	92.34		92.49		92.70		Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (Dengan Satuan:%)	100	100	364.000.000	100	364.000.000	100	728.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (Dengan Satuan:%)	88,91	88,22	240.000.000	89,58	240.000.000	90,45	480.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2025		2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase PD yang memiliki sistem data gender dan anak (Dengan Satuan:%)	36	40	160.000.000	45	200.000.000	59	360.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Capaian Kabupaten Layak Anak (Dengan Satuan:%)	0	0	605.000.000	0	650.000.000	0	1.255.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Indeks Perlindungan Anak (IPA) (Dengan Satuan:%)	0	0	720.000.000	47,82	720.000.000	69,87	1.440.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			839.000.000		839.000.000		1.678.000.000		
	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN			839.000.000		839.000.000		1.678.000.000		
2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Ketersediaan pangan utama (Dengan Satuan:ton)	1000	1000	200.000.000	1000	200.000.000	1000	400.000.000	Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	penyediaan dan penyaluran pangan pokok (Dengan Satuan:jenis)	9	9	304.000.000	9	304.000.000	9	608.000.000	Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	penanganan kerawanan pangan (Dengan Satuan:%)	90	90	85.000.000	90	85.000.000	90	170.000.000	Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (Dengan Satuan:%)	100	100	250.000.000	100	250.000.000	100	500.000.000	Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN			4.922.500.000		4.922.500.000		9.845.000.000		
	SEKRETARIAT DAERAH			4.922.500.000		4.922.500.000		9.845.000.000		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2025		2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.10.09	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Persentase luas lahan bersertifikat (Dengan Satuan:%)	80	90	4.922.500.000	90	4.922.500.000	90	9.845.000.000	Sekretariat Daerah
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			11.976.376.399		11.477.211.533		23.453.587.932		
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN			11.976.376.399		11.477.211.533		23.453.587.932		
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	terlaksananya pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah (Dengan Satuan:%)	90	90	7.393.441.065	90	7.106.444.738	90	14.499.885.803	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, Dan Perhubungan
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:dokumen)	1	1	250.000.000	1	250.000.000	1	500.000.000	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, Dan Perhubungan
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota (Dengan Satuan:%)	90	90	1.755.572.378	90	3.129.154.535	90	4.884.726.913	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, Dan Perhubungan
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Indeks Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan) (Dengan Satuan:skor)	70,28	70,28	1.500.000.000	73,82	0	75,75	1.500.000.000	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, Dan Perhubungan
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R (Dengan Satuan:%)	90	90	169.312.886	90	162.738.260	90	332.051.146	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, Dan Perhubungan
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PU (Dengan Satuan:%)	90	90	200.000.000	90	250.000.000	90	450.000.000	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, Dan Perhubungan
2.11.07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA (Dengan Satuan:%)	90	90	80.242.510	90	78.874.000	90	159.116.510	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, Dan Perhubungan
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan (Dengan Satuan:%)	90	90	100.000.000	90	150.000.000	90	250.000.000	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, Dan Perhubungan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2025		2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	% Penghargaan Lingkungan Kepada Masyarakat (Dengan Satuan:Persen)	0	90	120.000.000	90	150.000.000	90	270.000.000	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, Dan Perhubungan
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya (Dengan Satuan:%)	90	90	200.000.000	90	200.000.000	90	400.000.000	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, Dan Perhubungan
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Timbulan sampah yang ditangani (Dengan Satuan:%)	90	90	207.807.560	90	0	90	207.807.560	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, Dan Perhubungan
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			4.656.684.838		4.506.725.345		9.163.410.183		
	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			4.656.684.838		4.506.725.345		9.163.410.183		
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	terlaksananya pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah (Dengan Satuan:%)	100	100	2.883.777.505	100	2.798.349.075	100	5.682.126.580	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk (Dengan Satuan:%)	100	100	1.354.849.994	100	1.302.584.000	100	2.657.433.994	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Rasio pasangan berakte nikah (Dengan Satuan:%)	100	100	328.673.536	100	319.030.830	100	647.704.366	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK (Dengan Satuan:%)	100	100	78.070.542	100	75.780.090	100	153.850.632	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Tersedianya Informasi Kependudukan Berupa Buku Profil Kependudukan (Dengan Satuan:%)	100	100	11.313.261	100	10.981.350	100	22.294.611	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			7.701.328.453		8.243.732.543		15.945.060.996		
	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			7.701.328.453		8.243.732.543		15.945.060.996		
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor; Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik; Persentase pegawai disiplin;Persentase aparatu (Dengan Satuan:%)	100	95	3.888.812.633	95	3.986.630.633	95	7.875.443.266	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase penataan desa (Dengan Satuan:%)	80	80	70.000.000	80	109.999.100	80	179.999.100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2025		2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Jumlah BUMDes aktif; Status klasifikasi Desa di Kabupaten Gunung Mas (Desa Swasembada); Persentase aparatur yang mengikuti pelatihan; Persentase pelay (Dengan Satuan:Jenis)	75 Persen	39 Jenis	2.686.060.520	45 Jenis	3.115.115.350	75 Persen	5.801.175.870	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Jumlah kelompok usaha perempuan aktif; Jumlah kelompok usaha aktif; Jumlah Desa/Kelurahan yang mendapat akses TTG; Status perkembangan Desa di Kabypat (Dengan Satuan:Jenis)	26	26	1.056.455.300	26	1.031.987.460	27	2.088.442.760	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			9.983.000.000		10.233.000.000		20.216.000.000		
	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			9.983.000.000		10.233.000.000		20.216.000.000		
2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah (Dengan Satuan:%)	100	100	5.148.000.000	100	5.148.000.000	100	10.296.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Laju pertumbuhan penduduk (LPP) (Dengan Satuan:%)	1,86	1,81	644.000.000	1,76	644.000.000	1,63	1.288.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Total Fertility Rate (TFR) (Dengan Satuan:%)	2,76	2,57	2.741.000.000	2,5	2.741.000.000	2,35	5.482.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) (Dengan Satuan:Nilai)	0	0		0		60,13		Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR) (Dengan Satuan:%)	76,78	78,52		79,1		80,53		Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2025		2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Unmeet Need (Dengan Satuan:%)	14,7	13,23		11,9		10,68		Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Prevalensi Stunting (Dengan Satuan:buah)	32,83	22,87	1.450.000.000	20,65	1.700.000.000	13,99	3.150.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		Angka melahirkan pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR) (Dengan Satuan:Per 1000)	67	62		57		54		Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			658.190.958		626.197.900		1.284.388.858		
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN			658.190.958		626.197.900		1.284.388.858		
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas (Dengan Satuan:%)	0	2	429.740.269	2	406.618.230	2	836.358.499	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, Dan Perhubungan
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Menurunnya angka kecelakaan transportasi sungai (Dengan Satuan:%)	0	0	228.450.689	0	219.579.670	0	448.030.359	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, Dan Perhubungan
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			12.700.000.000		12.700.000.000		25.400.000.000		
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN			12.700.000.000		12.700.000.000		25.400.000.000		
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kelancaran Administrasi dan Operasional Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Dengan Satuan:%)	100%	100%	4.700.000.000	100%	4.700.000.000	100%	9.400.000.000	Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Sasaran Layanan Penyebaran Informasi dan Komunikasi Publik (Dengan Satuan:%)	20%	20%	3.800.000.000	20%	3.800.000.000	100%	7.600.000.000	Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Pelayanan Publik yang sudah terintegrasi, Persentase Akses Jaringan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) SOPD yang ter-integrasi (Dengan Satuan:%)	20%	20%	4.200.000.000	20%	4.200.000.000	100%	8.400.000.000	Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2025		2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			5.655.630.188		5.753.470.000		11.409.100.188		
	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH			5.655.630.188		5.753.470.000		11.409.100.188		
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	terlaksananya pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah (Dengan Satuan:%)	100	100	4.700.000.000	100	4.700.000.000	100	9.400.000.000	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, Dan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Meningkatkan pengetahuan tentang izin usaha simpan pinjam (Dengan Satuan:%)	90	90	50.000.000	90	50.000.000	90	100.000.000	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, Dan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Tertibnya koperasi yang sehat dan aktif (Dengan Satuan:%)	65	65	150.000.000	69	150.000.000	80	300.000.000	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, Dan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Meningkatnya pengetahuan tentang perkoperasian (Dengan Satuan:kegiatan)	1	1	55.630.188	1	53.470.000	1	109.100.188	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, Dan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Terlindungnya koperasi yang sehat dan aktif (Dengan Satuan:kegiatan)	1	1	150.000.000	1	200.000.000	1	350.000.000	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, Dan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Tersusunnya perencanaan dan terkoordinasinya program pembinaan dan pengembangan UKM (Dengan Satuan:%)	95	95	400.000.000	95	450.000.000	95	850.000.000	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, Dan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Peningkatan perekonomian UMKM dan UKM (Dengan Satuan:%)	90	90	150.000.000	92	150.000.000	98	300.000.000	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, Dan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			5.006.121.611		4.860.266.833		9.866.388.444		
	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			5.006.121.611		4.860.266.833		9.866.388.444		
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	terlaksananya pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah (Dengan Satuan:%)	90	100	3.234.265.918	100	3.108.675.433	100	6.342.941.351	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	pengembangan iklim penanaman modal (Dengan Satuan:%)	90	90	415.785.113	90	399.639.670	90	815.424.783	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2025		2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) (Dengan Satuan:investor)	10	10	106.070.580	10	101.951.730	10	208.022.310	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	pelayanan penanaman modal (Dengan Satuan:%)	100	100	350.000.000	100	350.000.000	100	700.000.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	pengendalian pelaksanaan penanaman modal (Dengan Satuan:%)	90	90	550.000.000	90	550.000.000	90	1.100.000.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	pengelolaan data dan sistem informasi (Dengan Satuan:%)	90	90	350.000.000	90	350.000.000	90	700.000.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			3.223.652.299		2.733.262.228		5.956.914.527		
	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA			3.223.652.299		2.733.262.228		5.956.914.527		
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	jumlah pemuda berpotensi, terampil dan terlatih (Dengan Satuan:%)	100	100	1.444.144.558	100	1.284.743.038	100	2.728.887.596	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olah Raga
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	jumlah olahragwan berbakat (Dengan Satuan:%)	100	100	929.507.741	100	548.519.190	100	1.478.026.931	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olah Raga
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	presentase pelaksanaan pengembangan kapasitas kepramukaan yang terpasilitasi (Dengan Satuan:%)	100	100	850.000.000	100	900.000.000	100	1.750.000.000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olah Raga
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			270.000.000		270.000.000		540.000.000		
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN			270.000.000		270.000.000		540.000.000		
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase pemanfaatan data untuk perencanaan pembangunan (Dengan Satuan:%)	20&	20%	270.000.000	20%	270.000.000	100%	540.000.000	Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			411.000.000		411.000.000		822.000.000		
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat Kematangan Keamanan Informasi (Dengan Satuan:%)	20%	20%	411.000.000	20%	411.000.000	100%	822.000.000	Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2025		2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			8.649.403.900		8.384.426.024		17.033.829.924		
	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA			8.649.403.900		8.384.426.024		17.033.829.924		
2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksanannya berbagai kegiatan yang berhubungan dengan layanan administrasi pemerintahan umum; Tersedianya sejumlah sarana dan prasarana penunjang P (Dengan Satuan:Dokumen)	35	7	5.374.403.900	7	5.362.852.162	35	10.737.256.062	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Terlaksananya Pelestarian, Pemanfaatan, Pelindungan, dan Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah Kabupaten Gunung Mas (Dengan Satuan:Kegiatan)	2	0	1.790.000.000	3	1.724.592.479	3	3.514.592.479	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Jumlah pelaku kesenian lokal yang didata dan dibina (Dengan Satuan:Orang)	0	3	480.000.000	3	311.937.568	29	791.937.568	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
		Jumlah Sanggar Seni yang Didata dan Dibina (Dengan Satuan:Unit)	0	34		2		40		Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Jumlah Warisan Budaya Takbenda (WBTb) Yang Dicatat (Dengan Satuan:Buah)	1	0	195.000.000	10	195.000.000	57	390.000.000	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu (Dengan Satuan:Buah)	15	15	660.000.000	1	660.000.000	19	1.320.000.000	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
		Benda, Situs, Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan (Dengan Satuan:Buah)	25	9		4		31		Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Jumlah museum yang dikelola (Dengan Satuan:buah)	1	1	150.000.000	1	130.043.815	1	280.043.815	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN			5.166.198.410		5.036.061.562		10.202.259.972		
	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN			5.166.198.410		5.036.061.562		10.202.259.972		
2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	terlaksananya pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah (Dengan Satuan:%)	90	90	4.301.517.930	90	4.405.780.536	90	8.707.298.466	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Rasio perpustakaan persatuan penduduk (Dengan Satuan:%)	1	1	669.680.480	1	630.281.026	1	1.299.961.506	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno (Dengan Satuan:kegiatan)	0	0	195.000.000	0	0	582,622,470	195.000.000	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2025		2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN			669.081.796		627.328.766		1.296.410.562		
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	pengelolaan arsip (Dengan Satuan:%)	90	90	270.000.000	90	233.051.946	90	503.051.946	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	perlindungan dan penyelamatan arsip (Dengan Satuan:%)	90	90	199.081.796	90	144.276.820	90	343.358.616	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2.24.04	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Terlayannya jumlah perizinan dalam penggunaan arsip (Dengan Satuan:pedoman)	0	0	200.000.000	0	250.000.000	0	450.000.000	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			57.962.781.774		57.123.916.874		115.086.698.648		
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTANDAN PERIKANAN			9.540.962.025		9.391.381.007		18.932.343.032		
	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN			9.540.962.025		9.391.381.007		18.932.343.032		
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	terlaksananya pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah (Dengan Satuan:%)	100	100	5.252.880.569	100	5.252.880.569	100	10.505.761.138	Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi perikanan kelompok nelayan (Dengan Satuan:%)	90	90	230.000.000	90	230.000.000	90	460.000.000	Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Cakupan bina kelompok nelayan (Dengan Satuan:%)	90	90	3.852.081.456	90	3.702.500.438	90	7.554.581.894	Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Produksi perikanan (Dengan Satuan:%)	90	90	206.000.000	90	206.000.000	90	412.000.000	Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			1.703.373.993		1.653.267.198		3.356.641.191		
	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA			1.703.373.993		1.653.267.198		3.356.641.191		
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Kunjungan Wisata (Dengan Satuan:Orang)	25915	12.093	1.290.373.993	7.200	1.240.267.198	46.543	2.530.641.191	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	PAD sektor pariwisata (Dengan Satuan:rupiah)		45.810.000	413.000.000	50.000.000	413.000.000	245.810.000.000.	826.000.000	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			32.303.891.460		31.960.511.207		64.264.402.667		
	DINAS PERTANIAN			32.303.891.460		31.960.511.207		64.264.402.667		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				2025		2026					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp		
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	terlaksananya pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah (Dengan Satuan:%)	90	90	18.842.891.460	90	18.499.511.207	90	37.342.402.667	Dinas Pertanian	
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	penyediaan dan pengembangan sarana pertanian (Dengan Satuan:%)	90	90	7.962.000.000	90	7.962.000.000	90	15.924.000.000	Dinas Pertanian	
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian (Dengan Satuan:%)	90	90	3.454.000.000	90	3.454.000.000	90	6.908.000.000	Dinas Pertanian	
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	pengendalian kesehatan hewan dan masyarakat veteriner (Dengan Satuan:%)	90	90	150.000.000	90	150.000.000	90	300.000.000	Dinas Pertanian	
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian (Dengan Satuan:%)	90	90	320.000.000	90	320.000.000	90	640.000.000	Dinas Pertanian	
3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	perizinan usaha pertanian (Dengan Satuan:%)	90	90	595.000.000	90	595.000.000	90	1.190.000.000	Dinas Pertanian	
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Cakupan bina kelompok petani (Dengan Satuan:%)	90	90	980.000.000	90	980.000.000	90	1.960.000.000	Dinas Pertanian	
3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN				6.088.791.268		5.753.029.412		11.841.820.680		
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN				6.088.791.268		5.753.029.412		11.841.820.680		
3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis (Dengan Satuan:%)	90	90	6.088.791.268	90	5.753.029.412	90	11.841.820.680	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, Dan Perhubungan	
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				2.238.508.520		2.286.288.500		4.524.797.020		
	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN				2.238.508.520		2.286.288.500		4.524.797.020		
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Jumlah Perizinan Pelaku Usaha dan Masyarakat yang menjalankan usahanya pada bidang perdagangan (Dengan Satuan:buah)	10	10	374.611.720	10	410.000.000	10	784.611.720	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Jumlah sarana dan prasarana perdagangan (Dengan Satuan:buah)	5	5	206.288.500	5	206.288.500	5	412.577.000	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2025		2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Jumlah Pelaku Usaha dan Ketersediaan Barang KebutuhaPokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat (Dengan Satuan:kali)	3	3	573.000.000	3	573.000.000	3	1.146.000.000	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	jumlah promosi dagang melalui pameran (Dengan Satuan:kegiatan)	3	3	104.040.000	3	100.000.000	3	204.040.000	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Tercapainya pelayanan Tera / Tera Ulang dan Pengawasan Kemetrolagian (Dengan Satuan:%)	90	90	797.000.000	90	797.000.000	90	1.594.000.000	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Jumlah keikutsertaan Kabupaten Gunung Mas dalam kegiatan promosi penggunaan produk dalam negeri (Dengan Satuan:kali)	4	4	183.568.300	4	200.000.000	4	383.568.300	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			5.886.000.000		5.886.000.000		11.772.000.000		
3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya urusan penunjang pemerintahan daerah pada perangkat daerah (Dengan Satuan:%)	90	90	4.325.000.000	90	4.325.000.000	90	8.650.000.000	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Peningkatan kualitas dan kwantitas pelaku IKM dan tersedianya Informasi Industri Kerajinan dan pangan di Kabupaten Gunung Mas (Dengan Satuan:buah)	4	4	1.061.000.000	4	1.061.000.000	4	2.122.000.000	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	pengawasan dan pembinaan IKM di 12 Kecamatan dalam memenuhi ketentuan/aturan perizinan IUI (Dengan Satuan:%)	90	90	250.000.000	90	250.000.000	90	500.000.000	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Pemutakhiran, evaluasi dan publikasi Data Informasi IKM di Kabupaten Gunung Mas (Dengan Satuan:%)	90	90	250.000.000	90	250.000.000	90	500.000.000	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI			201.254.508		193.439.550		394.694.058		
	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH			201.254.508		193.439.550		394.694.058		
3.32.02	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Tersediannya pemetaan potensi produk unggulan di kawasan transmigrasi (Dengan Satuan:%)	80	80	53.110.859	82	51.048.500	88	104.159.359	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, Dan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Terlaksananya Pelatihan Bagi Warga Transmigrasi (Dengan Satuan:%)	80	80	109.561.663	82	105.307.250	88	214.868.913	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, Dan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2025		2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3.32.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Terlaksananya kegiatan penguatan kegiatan SDM (Dengan Satuan:%)	80	80	38.581.986	82	37.083.800	88	75.665.786	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, Dan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			71.209.943.971		70.165.666.011		141.375.609.982		
4.01	SEKRETARIAT DAERAH			39.139.965.960		38.365.135.700		77.505.101.660		
	SEKRETARIAT DAERAH			39.139.965.960		38.365.135.700		77.505.101.660		
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	terlaksananya pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah (Dengan Satuan:%)	90	100	24.609.758.530	100	24.609.758.480	100	49.219.517.010	Sekretariat Daerah
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	tata kelola pemerintahan dan peningkatan kesejahteraan rakyat (Dengan Satuan:%)	90	100	11.376.000.000	100	11.376.000.000	100	22.752.000.000	Sekretariat Daerah
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	pengembangan perekonomian dan pembangunan (Dengan Satuan:%)	90	100	3.154.207.430	100	2.379.377.220	100	5.533.584.650	Sekretariat Daerah
4.02	SEKRETARIAT DPRD			32.069.978.011		31.800.530.311		63.870.508.322		
	SEKRETARIAT DPRD			32.069.978.011		31.800.530.311		63.870.508.322		
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	terlaksananya pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah (Dengan Satuan:%)	90	100	21.462.611.081	100	21.462.611.081	100	42.925.222.162	Sekretariat DPRD
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota (Dengan Satuan:%)	90	100	10.607.366.930	100	10.337.919.230	100	20.945.286.160	Sekretariat DPRD
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			258.882.481.783		259.536.886.249		518.419.368.032		
5.01	PERENCANAAN			8.992.955.844		9.877.143.142		18.870.098.986		
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN			8.992.955.844		9.877.143.142		18.870.098.986		
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	terlaksananya pelayanan urusan pemerintah daerah (Dengan Satuan:%)	93	96	5.912.703.735	97	6.158.637.462	100	12.071.341.197	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penelitian Pengembangan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2025		2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase ketersediaan data/informasi perencanaan pembangunan, Rasio Dokumen Perencanaan daerah dan perangkat daerah yang selesai tepat waktu (Dengan Satuan:%)	100	100	1.611.922.885	100	1.837.193.470	100	3.449.116.355	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penelitian Pengembangan
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	persentase capaian kinerja dokumen renstra PD bidang sosial budaya dan bidang ekonomi (Dengan Satuan:%)	95	95	1.468.329.224	95	1.881.312.210	95	3.349.641.434	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penelitian Pengembangan
5.02	KEUANGAN			238.415.005.922		237.778.061.645		476.193.067.567		
	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH			227.144.108.022		226.702.812.221		453.846.920.243		
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	terlaksananya pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah (Dengan Satuan:%)	100	100	32.809.129.071	100	32.427.970.141	100	65.237.099.212	Badan Keuangan Dan Aset Daerah
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Penetapan APBD (Dengan Satuan:%)	100	100	193.474.978.951	100	193.414.842.080	100	386.889.821.031	Badan Keuangan Dan Aset Daerah
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Opini BPK terhadap laporan keuangan (Dengan Satuan:jenis)	WTP	WTP	860.000.000	WTP	860.000.000	WTP	1.720.000.000	Badan Keuangan Dan Aset Daerah
	BADAN PENDAPATAN DAERAH			11.270.897.900		11.075.249.424		22.346.147.324		
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintaha (Dengan Satuan:Persentase)	100	100	8.575.352.130	100	8.053.424.069	100	16.628.776.199	Badan Pendapatan Daerah
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Capaian Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan:Persentase)	100	100	159.170.000	100	159.170.000	100	318.340.000	Badan Pendapatan Daerah
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Capaian Target Pendapatan Asli Daerah (Dengan Satuan:Persentase)	100	100	2.536.375.770	100	2.862.655.355	100	5.399.031.125	Badan Pendapatan Daerah
5.03	KEPEGAWAIAN			7.458.837.501		7.626.757.552		15.085.595.053		
	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			7.458.837.501		7.626.757.552		15.085.595.053		
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	terlaksananya pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah (Dengan Satuan:%)	100	100	5.078.837.501	100	5.216.757.552	100	10.295.595.053	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2025		2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Terlaksananya Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian (Dengan Satuan:%)	100	100	2.380.000.000	100	2.410.000.000	100	4.790.000.000	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Persentase Terlaksananya Mutasi dan Promosi (Dengan Satuan:Persen)	95	95		95		95		Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Persentase Terlaksananya Pengembangan Kompetensi ASN dan Penilaian, dan Evaluasi Kinerja Aparatur (Dengan Satuan:Persen)	95	95		95		95		Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			2.582.774.689		2.682.482.400		5.265.257.089		
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	terlaksananya pengembangan sumber daya pegawai negeri sipil (Dengan Satuan:orang)	150	150	2.582.774.689	150	2.682.482.400	150	5.265.257.089	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			1.432.907.827		1.572.441.510		3.005.349.337		
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN			1.432.907.827		1.572.441.510		3.005.349.337		
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Rasio hasil penelitian dan inovasi yang dikembangkan/ditindaklanjuti (Dengan Satuan:%)	100	100	1.432.907.827	100	1.572.441.510	100	3.005.349.337	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penelitian Pengembangan
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN			10.003.199.561		10.002.184.604		20.005.384.165		
6.01	INSPEKTORAT DAERAH			10.003.199.561		10.002.184.604		20.005.384.165		
	INSPEKTORAT			10.003.199.561		10.002.184.604		20.005.384.165		
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	terlaksananya pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah (Dengan Satuan:%)	100	100	7.560.751.129	100	7.560.041.004	100	15.120.792.133	Inspektorat
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase tindak lanjut temuan (Dengan Satuan:%)	100	100	2.204.000.000	100	2.204.000.000	100	4.408.000.000	Inspektorat
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase pelanggaran pegawai (Dengan Satuan:%)	10	10	238.448.432	10	238.143.600	10	476.592.032	Inspektorat
7	UNSUR KEWILAYAHAN			48.421.449.994		48.024.121.740		96.445.571.734		
	KECAMATAN KURUN			6.157.701.353		6.202.544.883		12.360.246.236		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2025		2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	KECAMATAN RUNGAN			5.496.649.442		5.464.394.312		10.961.043.754		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya urusan pemerintahan daerah (Dengan Satuan:%)	100	100	3.756.000.000	100	3.756.000.000	100	7.512.000.000	Kecamatan Rungan
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (Dengan Satuan:%)	100	100	29.010.638	100	27.884.120	100	56.894.758	Kecamatan Rungan
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Capaian Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dengan Satuan:%)	100	100	1.201.638.804	100	1.170.510.192	100	2.372.148.996	Kecamatan Rungan
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Terlaksananya Ketentraman dan Ketertiban umum di masyarakat (Dengan Satuan:%)	100	100	70.000.000	100	70.000.000	100	140.000.000	Kecamatan Rungan
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Terlaksana Urusan Pemerintahan Umum (Dengan Satuan:%)	100	100	288.000.000	100	288.000.000	100	576.000.000	Kecamatan Rungan
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Dengan Satuan:%)	100	100	152.000.000	100	152.000.000	100	304.000.000	Kecamatan Rungan
	KECAMATAN MIHING RAYA			3.912.763.331		3.571.177.439		7.483.940.770		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya urusan pemerintahan daerah (Dengan Satuan:%)	100	100	2.862.422.405	100	2.648.551.173	100	5.510.973.578	Kecamatan Mihing Raya
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Capaian Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dengan Satuan:%)	100	100	821.671.315	100	712.402.246	100	1.534.073.561	Kecamatan Mihing Raya
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Porsentase Tercapainya Pelaksanaan Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (Dengan Satuan:%)	100%	100%	64.612.534	100%	61.499.140	100%	126.111.674	Kecamatan Mihing Raya
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Capaian Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum (Dengan Satuan:%)	100	100	104.492.935	100	99.457.880	100	203.950.815	Kecamatan Mihing Raya
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Dengan Satuan:%)	100%	100%	59.564.142	100%	49.267.000	100%	108.831.142	Kecamatan Mihing Raya
	KECAMATAN RUNGAN HULU			3.800.094.262		3.652.531.969		7.452.626.231		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2025		2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya urusan pemerintahan daerah (Dengan Satuan:%)	100	100	2.673.662.097	100	2.569.840.539	100	5.243.502.636	Kecamatan Rungan Hulu
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Capaian Pelaksanaan Program Pemerintahan dan Pelayanan Publik (Dengan Satuan:%)	100	100	69.170.828	100	66.484.840	100	135.655.668	Kecamatan Rungan Hulu
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Capaian Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dengan Satuan:%)	100	100	798.144.577	100	767.151.650	100	1.565.296.227	Kecamatan Rungan Hulu
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (Dengan Satuan:%)	100	100	259.116.760	100	249.054.940	100	508.171.700	Kecamatan Rungan Hulu
	KECAMATAN DAMANG BATU			4.338.500.000		4.337.500.000		8.676.000.000		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kebutuhan dalam pelayanan administrasi Kantor ;Persentase sarana dan prasarana terawat dengan baik; Persentase kesiplinan pegawai; Persenta (Dengan Satuan:%)	80	80	3.307.000.000	85	3.307.000.000	100	6.614.000.000	Kecamatan Damang Batu
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan dan Urusan Pemerintah yang dilaksanakan di Kecamatan (Dengan Satuan:%)	80	80	40.000.000	85	40.000.000	100	80.000.000	Kecamatan Damang Batu
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Capaian Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dengan Satuan:%)	80	80	875.000.000	85	875.000.000	100	1.750.000.000	Kecamatan Damang Batu
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase menurunnya gangguan ketentraman dan ketertiban pada masyarakat umum (Dengan Satuan:%)	20	20	42.000.000	15	42.000.000	0	84.000.000	Kecamatan Damang Batu
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (Dengan Satuan:%)	80	80	33.500.000	85	33.500.000	100	67.000.000	Kecamatan Damang Batu
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Capaian Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Dengan Satuan:%)	80	80	41.000.000	85	40.000.000	100	81.000.000	Kecamatan Damang Batu
	KECAMATAN MANUHING RAYA			4.030.000.000		4.030.000.000		8.060.000.000		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya urusan pemerintahan daerah (Dengan Satuan:%)	100	100	3.044.000.000	100	3.044.000.000	100	6.088.000.000	Kecamatan Manuhing Raya

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2025		2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Capaian Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dengan Satuan:%)	100	100	880.000.000	100	880.000.000	100	1.760.000.000	Kecamatan Manuhing Raya
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum (Dengan Satuan:Barang dan bahan lain lain)	50%	100%	35.000.000	100%	35.000.000	100%	70.000.000	Kecamatan Manuhing Raya
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Tercapainya pembinaan Masyarakat di tingkat Kecamatan dan Kelurahan (Dengan Satuan:persen ( % ))	50%	100%	35.000.000	100%	35.000.000	100%	70.000.000	Kecamatan Manuhing Raya
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Tercapainya pembinaan dan pengawasan pemerintahan di Desa dan kelurahan (Dengan Satuan:Persen ( % ))	40%	100%	36.000.000	100%	36.000.000	100%	72.000.000	Kecamatan Manuhing Raya
	KECAMATAN MIRI MANASA			3.091.137.491		2.971.104.855		6.062.242.346		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya urusan pemerintahan daerah (Dengan Satuan:%)	100	100	2.160.371.857	100	2.076.481.985	100	4.236.853.842	Kecamatan Miri Manasa
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Cappaian Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dengan Satuan:%)	100	100	795.905.615	100	764.999.630	100	1.560.905.245	Kecamatan Miri Manasa
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Capaian Pelaksanaan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (Dengan Satuan:%)	100	100	36.820.006	100	35.390.240	100	72.210.246	Kecamatan Miri Manasa
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (Dengan Satuan:%)	100	100	58.907.240	100	56.619.800	100	115.527.040	Kecamatan Miri Manasa
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Capaian Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Dengan Satuan:%)	100	100	39.132.773	100	37.613.200	100	76.745.973	Kecamatan Miri Manasa
	KECAMATAN RUNGAN BARAT			426.492.135		405.743.490		832.235.625		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan daerah (Dengan Satuan:%)	100	100	101.675.480	100	101.275.480	100	202.950.960	Kecamatan Rungan Barat
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Capaian Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dengan Satuan:%)	100	100	159.804.270	100	159.804.270	100	319.608.540	Kecamatan Rungan Barat
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Capaian Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (Dengan Satuan:%)	100	100	23.780.000	100	8.915.580	100	32.695.580	Kecamatan Rungan Barat

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2025		2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Capaian urusan pemerintahan umum (Dengan Satuan:%)	100	100	131.487.895	100	126.382.060	100	257.869.955	Kecamatan Rungan Barat
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Capaian Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Dengan Satuan:%)	100	100	9.744.490	100	9.366.100	100	19.110.590	Kecamatan Rungan Barat
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			6.350.016.864		6.464.712.689		12.814.729.553		
	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			6.350.016.864		6.464.712.689		12.814.729.553		
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah (Dengan Satuan:%)	100	100	3.466.848.993	100	3.979.991.070	100	7.446.840.063	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase masyarakat yang mengerti tentang Wawasan Kebangsaan (Dengan Satuan:%)	90	100	213.653.980	100	310.010.000	90	523.663.980	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) /(Nilai/Angka) (Dengan Satuan:%)	80	100	930.529.616	100	960.588.109	90	1.891.117.725	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase pembinaan terhadap Ormas, LSM dan OKP aktif (Dengan Satuan:%)	90	100	245.598.354	100	235.390.030	90	480.988.384	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya (Dengan Satuan:%)	90	100	953.068.973	100	479.953.860	90	1.433.022.833	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase potensi terjadinya gangguan keamanan yang terdeteksi (Dengan Satuan:%)	90	100	540.316.948	100	498.779.620	90	1.039.096.568	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
			TOTAL:	1.335.196.779.787		1.339.290.269.200		2.674.487.048.987		

## **BAB IX**

### **PENUTUP**

RPD merupakan dokumen rencana pembangunan daerah sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahun 2025 dan 2026 mendatang yang harus ditaati oleh seluruh pemangku kepentingan. Dengan ini penting dipahami oleh segenap pihak terkait bagaimana mengoperasionalkan RPD, baik dalam masa pelaksanaan maupun masa transisi, agar RPD ini mampu menjadi pedoman dalam pengelolaan kinerja oleh Perangkat Daerah dan kolaborasinya dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan pemerintah pusat dalam mencapai tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Dasar Negara Tahun 1945. RPD Kabupaten Gunung Mas tahun 2025-2026 merupakan dokumen perencanaan daerah Kabupaten Gunung Mas yang berisi penjabaran Tujuan dan Sasaran Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kabupaten Gunung Mas, serta memperhatikan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah.

#### **9.1 Pedoman Transisi**

Pedoman transisi merupakan acuan penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah pada akhir periode RPJMD tahun 2024 hingga terpilihnya kepala daerah baru dan tersedianya dokumen RPJMD sebagai hasil penjabaran visi dan misi Bupati terpilih. Pedoman transisi ini juga dimaksudkan untuk memberikan panduan kepada pemerintahan daerah agar lebih siap dalam menyusun dokumen rencana pembangunan pada periode berikutnya sehingga tidak terjadi kekosongan pengaturan sebagai wujud upaya menjaga kesinambungan pembangunan dan ketersediaan dokumen rencana pembangunan.

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan menghindari kekosongan rencana pembangunan daerah, Bupati pada tahun terakhir masa jabatannya, yaitu pada tahun 2024, menyusun dokumen :

##### **a. RPD Tahun 2025-2026**

Sesuai amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah bagi Daerah yang masa RPJMDnya berakhir pada tahun 2024, bahwa Daerah (termasuk Gunung Mas) menyusun RPD Tahun 2025-2026 sebagai dasar dan pedoman penyusunan perencanaan dan penganggaran tahun 2025 dan 2026. Penetapan dari RPD tersebut adalah paling lambat bulan Januari tahun 2024 sehingga dengan penetapan RPD tersebut maka ada dasar dari daerah melaksanakan tahapan penyusunan RKPD Tahun 2025 mulai dari inputan SIPD hingga Musrenbangnya, mengingat RKPD ditetapkan paling lambat Juni 2024.

pembiayaan maupun waktu pelaksanaan serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Adapun kaidah pelaksanaan RPJMD Kabupaten Gunung Mas tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :

1. Badan/Dinas/Unit Satuan Kerja di lingkungan Kabupaten Gunung Mas tahun 2025-2026, serta masyarakat, termasuk dunia usaha, agar melaksanakan program-program dalam RPD ini dengan sebaik-baiknya.
2. Berdasarkan Pasal 272 ayat (1) dan Pasal 273 ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra berpedoman pada RPD untuk dirumuskan dalam rancangan Renja sebagai bahan penyusunan RKPD.
3. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunung Mas ini selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) mulai tahun 2025 hingga 2026.
4. Sesuai Insmendagri 3/2023, dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPD Kabupaten Gunung Mas tahun 2025-2026, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Gunung Mas berkewajiban untuk melakukan pemantauan, fasilitasi, dan mediasi terhadap Renstra dan Renja PD.
7. Agar pencapaian kinerja pembangunan berjalan sesuai harapan, maka setiap kinerja kegiatan harus dipublikasikan dan mendengarkan aspirasi masyarakat secara luas.
8. Pemerintah Kabupaten Gunung Mas wajib menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPD kepada seluruh pemangku kepentingan.

Dengan melihat beban tanggung jawab yang sangat besar, maka dengan memanjatkan Do'a Kepada Tuhan YME, kita semua berharap penjabaran Tujuan dan Sasaran Daerah yang ada dalam dokumen RPD ini dapat dilaksanakan dengan baik sehingga akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Gunung Mas di masa yang akan datang.

  
BUPATI GUNUNG MAS,  
JAYA SAMAYA MONONG, S.E., M.Si